

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Pada Prodi Akuntansi



OLEH :

ATHAYA JULIE KUSWANTO

NPM: 2112020087

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2025**

Skripsi oleh:

ATHAYA JULIE KUSWANTO
NPM: 2112020087

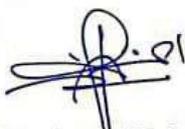
Judul:

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2018-2023**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi
Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Tanggal: ***1 Juli 2025***

Pembimbing I



Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

Pembimbing II



Erna Puspita, S.E., M.Ak.
NIDN. 0711128803

Skripsi Oleh:

ATHAYA JULIE KUSWANTO

NPM: 2112020087

Judul:

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
PERIODE 2018-2023**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Prodi Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

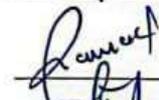
Pada tanggal: 9 Juli 2025

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr. Amin Tohari, M.Si.
2. Penguji I : Badrus Zaman, M.Ak.
3. Penguji II : Erna Puspita, S.E., M.Ak.







Mengetahui,
Dekan FEB


Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Athaya Julie Kuswanto
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk / 23 Juli 2003
NPM : 2112020087
Fak/Jur./Prodi. : FEB / S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 9 Juli 2025

Yang Menyatakan



ATHAYA JULIE KUSWANTO
NPM: 2112020087

Motto:

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Rum:60)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi rasa ketakutanlah yang membuat jadi sulit untuk maju. Jadi, jangan mudah menyerah.”

(Athaya Julie)

Kupersembahkan karya ini buat:

Ibu dan Bapak. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.

Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi.

Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi. I love you more.

Abstrak

Athaya Julie Kuswanto Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023, Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2025.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio keserasian.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya defisit, sehingga belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Dalam era otonom ini, pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan dan mengatur sendiri dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dilihat dari rasio keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023 dengan dinilai melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan rasio keserasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dan objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai melalui rasio kemandirian dinyatakan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai melalui rasio efektivitas dinyatakan sangat efektif. (3) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai melalui rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dinyatakan sangat rendah. (4) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai melalui rasio keserasian dinyatakan kurang serasi karena lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, diharapkan: (1) Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan memaksimalkan peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi pendapatannya. (2) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat menyeimbangkan antara belanja operasi dengan belanja modal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini, khususnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Dr. Amin Tohari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri serta Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan pengarahan selama proses bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Erna Puspita, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan pengarahan selama proses bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Terkhusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Bambang Kuswanto dan Ibu Arti Wahyuningsih yang sangat berjasa dalam hidup saya dan selalu mengusahakan anak pertamanya ini hingga menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa, motivasi, dukungan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah saya. Terima kasih atas pengorbanan dan kesabaran yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiin.
6. Adik kandung saya satu-satunya, Talitha Julie Kuswanto yang telah menghibur dan mengerti *mood* saya selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Terima kasih atas doa dan dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Eyang Suwarti, yang juga selalu mengusahakan cucu pertamanya ini dari kecil hingga menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa,

motivasi, dan dukungan yang selalu mendampingi setiap langkah saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiin.

8. Seluruh teman-teman sesama Prodi Akuntansi angkatan 2021, khususnya Ananda Putri Dwitasari yang menjadi teman dari awal perkuliahan, Adinda Putri Ambarwati yang sabar-nya seluas samudra, Bela Kusuma Ningrum, dan Beiby Sukma Diva. Terima kasih telah berpartisipasi dalam proses penelitian berlangsung hingga selesai. Terima kasih atas dukungan dan pengalaman yang sangat berkesan hingga terselesaikannya perkuliahan ini.
9. Seluruh pihak dan lembaga terkait yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah membantu dan meluangkan waktu dalam proses penelitian berlangsung hingga terselesainya skripsi ini.
10. Athaya Julie Kuswanto, diriku sendiri. Terima kasih atas kerja keras dan semangatnya telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bertahan sampai detik ini dan mau berusaha serta ikhlas dengan apapun hasilnya. Tetaplah jadi manusia yang rendah hati, mau berusaha, dan tidak takut untuk mencoba.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penelitian ini dari berbagai pihak.

Kediri, 9 Juli 2025

Athaya Julie Kuswanto
NPM : 2112020087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kinerja Keuangan	8
B. Rasio Kemandirian	9
C. Rasio Efektivitas	11
D. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
E. Rasio Keserasian	14
F. Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Desain Penelitian	19
B. Definisi Operasional	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	24
D. Prosedur Penelitian	25
E. Tempat dan Jadwal Penelitian	28
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	54

A. Simpulan	54
B. Implikasi.....	55
C. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.....	3
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian	10
Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas.....	12
Tabel 2. 3 Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD.....	14
Tabel 2. 4 Kriteria Rasio Keserasian.....	15
Tabel 3. 1 Kriteria Rasio Kemandirian	20
Tabel 3. 2 Kriteria Rasio Efektivitas.....	22
Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD.....	23
Tabel 3. 4 Kriteria Rasio Keserasian.....	24
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 3.6 Kriteria Rasio Kemandirian	31
Tabel 3.7 Kriteria Rasio Efektivitas.....	31
Tabel 3. 8 Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD.....	32
Tabel 3. 9 Kriteria Rasio Keserasian.....	33
Tabel 4. 1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Nganjuk	35
Tabel 4. 2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	38
Tabel 4. 3 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	41
Tabel 4. 4 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	43
Tabel 4. 5 Rasio Belanja Modal Pmerintah Kabupaten Nganjuk	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 .	4
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir	18
Gambar 3. 1 Bagan Alir Prosedur Penelitian	28
Gambar 4. 1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	37
Gambar 4. 2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk	39
Gambar 4. 3 Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nganjuk	42
Gambar 4. 4 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	45
Gambar 4. 5 Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan	63
Lampiran 2. Surat Pengantar/Ijin Penelitian	65
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian	66
Lampiran 4. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan dan mengatur sendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah, 2004). Dengan adanya program otonomi daerah tentunya menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sistem keuangan yang efisien dan akuntabel dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pengelolaan keuangan daerah memegang peran penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Purba & Silitonga, 2022).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah (Latif et al., 2019). Dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan penganggaran pendapatan dan belanja daerah dengan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Martunus & Ratno, 2023). Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban APBD, Pemerintah Daerah menyelenggarakan akuntansi Pemerintah Daerah melalui penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah secara tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai dan dipercaya dalam mengelola keuangan dan aset daerah (Rachmawati &

Handayani, 2023). Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan atas posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode.

Dalam era ini Pemerintah Daerah tentunya diharapkan agar dapat membangun suatu daerah secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukannya penilaian kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Latief et al., 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya (Arfan et al., 2023).

Untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) menggunakan rasio keuangan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya. Sehingga Pemerintah dapat menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam era otonomi daerah, mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, dapat mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam periode waktu tertentu, serta mengukur efektivitas dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dengan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pada kenyataannya, Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih merupakan penerimaan yang terbesar dibandingkan dengan PAD yang artinya belum semua daerah dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya daerah yang dimiliki sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih belum dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga kinerja keuangan daerah dinyatakan masih belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ,dan pendapatan lainnya. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; TKDD meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah; Sedangkan pendapatan lainnya meliputi pendapatan hibah, dana darurat. Sedangkan belanja daerah Kabupaten Nganjuk meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja lainnya seperti belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga. Pendapatan dan belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Nganjuk tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

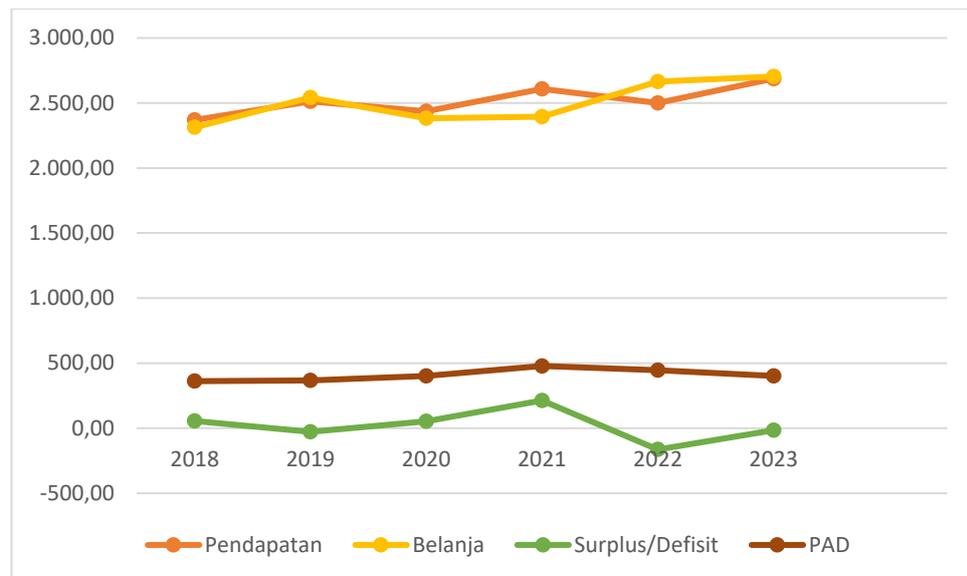
(Dalam Milyar)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	2.369,55	2.512,98	2.435,40	2.608,44	2.501,20	2.687,33
Belanja	2.312,80	2.542,00	2.383,28	2.395,34	2.665,21	2.703,43
Surplus/Defisit	56,75	(29,02)	52,12	213,10	(164,01)	(16,10)
PAD	361,59	368,27	402,35	478,46	445,59	402,49

Sumber: djpk.kemenkeu

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sampai terjadi defisit sebesar Rp27,73M, tetapi pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sehingga terjadi surplus sebesar Rp23,1M dan juga pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar Rp160,98M, namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan hingga terjadi defisit kembali sebesar Rp49,09M, dan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar Rp147,91M namun masih dinyatakan defisit. Hal ini disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun, sedangkan realisasi anggaran pendapatan daerah

masih kurang yang disebabkan oleh kurangnya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menganggarkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menunjukkan bahwa kinerja keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih belum optimal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada fluktuasi gambar realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada grafik berikut.



Sumber: djpk.kemenkeu

Gambar 1.1 Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dikarenakan realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah sampai mengalami penurunan hingga terjadi defisit, yang disebabkan oleh kurangnya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menganggarkan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dikategorikan kurang baik dikarenakan realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat kemampuan dan kemandirian Pemerintah Kota Kendari setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan ditinjau dari analisis rasio keuangan belum begitu baik.

Terlihat dari tingkat rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari bersifat instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dilihat dari rasio efektifitas Pemerintah Kota Kendari untuk pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung belum stabil atau belum efektif, dilihat dari rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal tergolong efisien, dilihat dari rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan, dilihat dari rasio cakupan layanan utang Pemerintah Kota Kendari apabila kekurangan dana mempunyai kesempatan untuk melakukan pinjaman, serta dilihat dari rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih rendah (Hasnita, 2021).

Namun dari penelitian terdahulu lainnya, perhitungan hasil rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang periode tahun anggaran antara 2016-2021, didapatkan hasil rasio kemandirian yang cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan sumber daya, dilihat dari rasio efektifitas PAD menunjukkan telah mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, dilihat dari rasio efisiensi PAD menunjukkan lebih banyak mengeluarkan dana untuk mengumpulkan PAD dalam menghasilkan keluaran (*outcomes*) dan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kota Magelang masih belum optimal, dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016-2021 (Afifah et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa berdasarkan dari perhitungan hasil rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang periode 2018-2020, dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, yang artinya daerah belum mampu mewujudkan otonomi daerah. Dilihat dari rasio

efektivitas PAD menunjukkan bahwa belum maksimal secara efektif dalam mengelola target PAD. Dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan bahwa dinilai melakukan pemborosan anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa independensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal kemampuan keuangan masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah tergolong kurang efektif (Ula & Bharata, 2022).

Dari fakta yang ada terdapat kesenjangan berupa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan pendapatan asli daerah masih kurang sehingga terjadi defisit dan terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai penilaian kinerja keuangan daerah dengan menganalisis rasio keuangan. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan otonomi daerah dengan melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio pertumbuhan?

4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio keserasian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diambil beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio kemandirian.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio efektivitas.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio pertumbuhan.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dilihat dari rasio keserasian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti mengenai hasil analisis rasio keuangan meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi dan diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A., Febriyan, I., & Bharata, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Kota Magelang Periode 2016 – 2021 Penilaian Kinerja Berdasarkan Rasio Keuangan. *JURNALMANEKSI*, 12, 288–292.
- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis Rasio Pendapatan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020. *JURNALECONOMINA*, 2, 979–992.
- Azhar, I. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*.
- djpk.kemenkeu. (n.d.). *Portal Data APBD*. retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Fahmi, I. (2017). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (D. Handi, Ed.). Alfabeta.
- Halijah, N., & Nurwani. (2022). Analisis Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 365(4). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Hartoyo. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu). *JurnalPenKoMi:KajianPendidikan&Ekonomi*, 4(1), 1–17.
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *JurnalIndonesiaSosialSains*, 2, 1320–1329.
- Julaeha, R., & Penangsang, P. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023. *JurnalNirta:StudiInovasi*, 4(1).
- Latief, M., Wijayanti, H., Wijayanti, I., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021. *JournalofEconomic,BusinessandAccounting*, 6, 2555–2566.
- Latif, A., Rikie, Andriyana, Y., Kuswanto, Rosada, H., Maulana, A., & Hasbi. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. ASIANDEVELOPMENTBANK.
- Mahmudi. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (4th ed.). SEKOLAHTINGGIILMUMANAJEMENYKPN.
- Martunus, I., & Ratno. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah. *JurnalIlmiahEkomen*, 23(2), 92–102.

- Mulyaningsih, A., & Sunaningsih, S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Muto'i, M. (2018). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Nurazhari, N. (2024). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2024*, 2(2), 87–106.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Purba, P., & Silitonga, A. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *AKUNTANSIPRIMA*, 4, 104–115.
- Rachmawati, T., & Handayani, N. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA. *Jurnalilmudanrisetakuntansi*, 12(11), 1–16.
- Rahayu, Y., Sarwono, A., & Sunarti. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014 – 2018*.
- Rahmasari, A., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>
- Restiana, Isma, A., & Prasaja, A. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. *EBisnis Manajemen*, 2(1), 8–24.
- Saifrizal, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitiandan Pengembangan*, 2(3).
- Syamsurizal, S., Musa, C., Nurman, N., Musa, M., & Amin, A. (2023). Analisis Rasio Efisiensi, dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(4), 191–205. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i4.1852>
- Ula, N., & Bharata, R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). *TRANSEKONOMIKA*, 2, 405–414.

Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 (1)*.

Wicaksana, H. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019)*. UniversitasPancasaktiTegal.